

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN yang kita kenal sebagai regionalisasi Asia Tenggara telah merancang sebuah integrasi ekonomi bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community merupakan salah satu program ekonomi dari ASEAN yang diberlakukan awal tahun 2016 dalam rangka bersaing menghadapi persaingan ekonomi dengan Negara diluar ASEAN seperti China dan India. MEA ini sendiri dengan kata lain ialah mendirikan *Free Trade Area* di Negara Negara ASEAN dimana nantinya antar Negara di ASEAN memungkinkan untuk menjual produk barang dan jasa dengan mudah tanpa hambatan yang berarti (penghilangan tarif perdagangan) dan akan membuat persaingan ekonomi di negara ASEAN semakin ketat. Sektor yang diprioritaskan ada 12 sektor yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ke-7 sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.¹

Jika dilihat kedalam sektor prioritas Masyarakat Ekonomi Asean, terdapat peluang besar bagi regional Asia Tenggara ini untuk bersama-sama meningkatkan keuntungan di bidang perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan dengan berlakunya MEA ini adalah meningkatkan kerjasama demi memudahkan mobilisasi turis yang berkunjung ke negara-negara ASEAN. Sisi letak geografis yang berada di kawasan tropis, negara-negara di Asia

¹ Wangke. Humprey. 2014. *Peluang Indonesia Dalam MEA*, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-4.pdf, diakses pada 8 Januari 2016.

Tenggara memiliki daya tarik tersendiri di sektor pariwisata. Negara-negara di ASEAN pun sangat kaya akan wisata alam dan juga keunikan kultur yang multikultural hingga menjadikan sektor pariwisata juga menjadi cara lain untuk mendapat pemasukan devisa negara di era 1980an sebagai alternatif karena sektor minyak dunia yang mengalami penurunan di tahun 1970an sehingga sektor pariwisata ini menjadi salah satu industri kunci di ASEAN.²

Thailand merupakan contoh negara di ASEAN yang sukses di sektor pariwisatanya. Negara ini terletak dengan letak geografis yang menguntungkan dengan memiliki dua pantai yang terkenal yaitu pantai Pattaya dan Phuket. Melalui daya tarik ini Thailand sukses menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan negaranya. Menurut data statistik, sektor pariwisata di Thailand menghasilkan 19.5% dari GDP nasional pada tahun 2013.³ Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata menjadi prospek yang baik untuk dikembangkan di kawasan ASEAN terlebih telah didukung oleh adanya kerjasama ekonomi MEA di tahun 2016.

Kerjasama di sektor pariwisata antarnegara ASEAN sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2006 ASEAN menyepakati untuk membebaskan visa kunjungan bagi warga negaranya yang berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN.⁴ Hal ini mendorong angka kunjungan antarnegara

² Effendi, Yuventus. Suska. *Memanfaatkan Kerjasama Pariwisata Asean Untuk Mendorong Industri Pariwisata Indonesia*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Asean%20TourismSuska%20&%20Yuventus%20Effendi.pdf>, diakses pada 20 Januari 2016.

³ YCI, *Thailand YCI Country Information*, <http://www.youthcareerinitiative.org/country/thailand>, diakses pada 30 Januari 2016.

⁴ ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption Kuala Lumpur, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security->

ASEAN. Dilihat dari data statistik pada tahun 2007 setahun setelah kesepakatan membebaskan visa bagi negara anggotanya hingga 2009 jumlah kunjungan wisatawan didalam intra ASEAN mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Contohnya negara Malaysia sebagai negara yang paling banyak di kunjungi pada tahun 2007 dikunjungi oleh 15.620 juta wisatawan dari ASEAN kemudian pada tahun 2008 angka itu bertambah menjadi 16.637 juta kunjungan hingga pada 2009 tercatat 18.386 juta kunjungan dari wisatawan intra ASEAN ke negara tersebut.⁵ Melihat dari angka statistik tadi masih terdapat cara yang bisa di gunakan untuk mengundang lebih banyak lagi wisatawan untuk datang.

Jika melihat kedalam ASEAN, semua negara anggota memiliki potensi wisata tersebut. Kemudian potensi pariwisata di negara-negara ASEAN sangatlah banyak dan tiap negara memiliki daya tariknya masing-masing untuk di kunjungi. Pengembangan layanan *Cruise* atau berlayar menggunakan kapal pesiar memiliki prospek yang baik dalam hal ini, di dukung dengan geografis ASEAN yang merupakan *archipelago*. Dengan terciptanya paket wisata seperti ini negara-negara ASEAN akan merasakan kemajuan perekonomian yang sama di sektor pariwisata. Sebagai contoh, perjalanan dimulai dari Indonesia dan berakhir di Vietnam dengan singgah di berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura. Tentu hal ini akan sangat baik bagi sektor pariwisata mereka.

Untuk memaksimalkan kunjungan turis ke dalam ASEAN maka perlu ada suatu mekanisme baru untuk mengintegrasikan kawasan pariwisata yang ada di ASEAN dan juga sistem *Common Visa* seperti *Visa Schengen* yang berlaku

community/item/asean-framework-agreement-on-visa-exemption-kuala-lumpur-25-july-2006-2, diakses pada 27 Januari 2016.

⁵ ASEAN. *Tourism*

Statistic, <http://www.asean.org/news/item/tourism-statistics>, diakses pada 27 Januari 2016.

di wilayah Uni Eropa dimana pemegang paspor dari negara-negara yang tergabung dalam Schengen Agreement tadi bebas keluar masuk ke negara anggota Schengen tanpa ada hambatan dimasalah keimigrasian sehingga memudahkan mobilitas.⁶ Hal ini diperlukan untuk mendukung paket-paket wisata ASEAN tadi. Bebas visa yang berlaku saat ini hanyalah berlaku untuk warga ASEAN saja.

Dilihat dari contoh pemberlakuan Visa Schengen, banyak keuntungan bagi ASEAN jika hal serupa diterapkan. Pertama warga asing diluar ASEAN tidak perlu untuk repot mengurus visa ke setiap negara ASEAN jika ingin berkunjung ke lebih dari satu negara ASEAN. Hal ini dapat menghemat biaya pengeluaran bagi wisatawan dan juga menjadi lebih praktis dan efisien sehingga berpotensi untuk mendatangkan lebih banyak turis asing ke wilayah ASEAN. Keuntungan kedua terjadi pemerataan kunjungan bagi negara-negara di ASEAN, dengan tidak direpotkan oleh sistem keimigrasian yang rumit maka orang cenderung akan berkunjung ke berbagai tempat di ASEAN lain yang belum pernah dikunjungi khususnya para wisatawan yang sedang libur panjang. Contohnya saja jika orang Budha ingin melakukan wisata religi di ASEAN. Terdapat 2 negara dengan tujuan terbesar untuk wisata religi Budha di ASEAN, yaitu Kamboja yang terkenal dengan Angkor Wat, dan Indonesia dengan Candi Borobudurnya. Apabila wisatawan memilih berkunjung ke salah satu destinasi dari kedua tempat tadi pasti mereka akan mempertimbangkan pula berkunjung ke dua negara sekaligus mengingat persyaratan ke imigrasian telah dipermudah.

Menurut data dari UNWTO apabila ASEAN melakukan sistem Common Visa bagi negara anggotanya di prediksi akan mengalami kenaikan wisatawan berkisar dari 6 juta wisatawan (*Low Season*) hingga 10 juta wisatawan (*High*

⁶ *The Schengen area and cooperation*, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33020> diakses pada 30 Januari 2016.

Season) pada tahun 2016.⁷ Kemudian dalam hal pendapatan juga akan mengalami peningkatan, dari 6 juta hingga 10 juta wisatawan yang akan datang, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan antara 7 Milyar USD hingga 12 Milyar USD.⁸ Tentunya merupakan sebuah keuntungan yang sangat berharga apabila ASEAN sebagai suatu kawan wisata yang terintegrasi dapat terlaksana dengan maksimal.

Dengan berlakunya MEA mulai awal tahun 2016, ini merupakan peluang besar untuk mewujudkan sistem integrasi kawasan wisata dan juga common visa sebagai upaya untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di kawasan ASEAN. Namun hal ini juga perlu didukung oleh infrastruktur penunjang agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Perlu ada kerjasama dan perencanaan matang dari lembaga terkait di setiap negara-negara ASEAN untuk mewujudkan hal ini dan menutup celah-celah yang ada bagi para penjahat yang ingin memanfaatkan sistem ini. Keberagaman budaya yang ada di setiap negara-negara ASEAN dan kondisi geografis yang terletak menjadi nilai lebih untuk terwujudnya kawasan integrasi pariwisata. Uni Eropa sebagai contoh sukses penerapan common visa yang berhasil menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke negaranya. Dengan adanya MEA ini merupakan prospek yang bagus untuk menciptakan sistem baru ini yang akan menghasilkan keuntungan lebih bagi negara-negara ASEAN.

Dalam rangka menarik perhatian banyak para wisatawan, banyak negara berlomba-lomba untuk memajukan pariwisata di dalam negara serta memberikan berbagai penawaran menarik untuk wisatawan, sehingga keadaan

⁷ UNWTO/WTTC. 2014. *The Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States*, http://www.wttc.org/media/files/reports/policy%20research/impact_asean.pdf diakses pada 25 Januari 2016.

⁸ *Ibid.*,

tersebut memunculkan adanya competitor baru bagi Indonesia khususnya di dalam mempromosikan pariwisata negara.

Melihat perkembangan hubungan Indonesia dengan Thailand yang semakin kondusif, KBRI Bangkok menjalin kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand dan Kementerian Kebudayaan Thailand. KBRI Sebagai representasi dari pemerintah Indonesia menjadi poros atau menjadi jembatan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand untuk saling bekerjasama meningkatkan berbagai macam kerjasama yang salah satunya yakni dibidang pariwisata. Sesuai data dari Departemen Pariwisata Thailand, warga kelas menengah Thailand secara keseluruhan yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata mencakup sedikitnya 6,44 juta orang pada tahun 2014. Jumlah tersebut mewakili sekitar 35% dari jumlah total penduduk yang termasuk golongan kelas menengah keatas yang secara ekonomi memiliki kemampuan dan berkebutuhan untuk melakukan wisata ke luar negeri. Namun dari jumlah tersebut yang memilih Indonesia sebagai destinasi wisata masih relatif sedikit, hanya 67.360 orang.⁹ Indonesia mempunyai kepentingan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan dari Thailand begitupula dengan Thailand. KBRI Thailand bekerjasama dalam bentuk mengadakan acara-acara promosi kebudayaan, tempat wisata, acara-acara yang diselenggarakan di Indonesia agar warga Thailand sadar atau mengetahui hal-hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, yaitu:

⁹ Berkas KRI Songkhla, 3 Juni 2015 “Mengenai Kegiatan *Familiarization Visit* untuk *Tour Operators* dan *Tourism Journalists*”

“Bagaimana upaya-upaya KBRI Bangkok dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Thailand ke Indonesia?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa maka digunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu sesuai dengan pokok permasalahan tentang bagaimana upaya KBRI Bangkok dalam mendorong/meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan pada landasan-landasan Teori Pariwisata Internasional, Konsep Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata dan dan Teori Diplomasi.

1. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹⁰

Wisata budaya sebagai salah satu jenis pariwisata ternyata tidak hanya terkait dengan kebudayaan klasik atau tata nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dan kemudian berkembang sebagai *country heritage*, namun juga kebudayaan masa kini (*contemporary culture*). Berkaitan dengan hal ini Charles R. Goldner menyatakan bahwa:

¹⁰ John. Swarbrooke, 1996. *Development and Management of Visitor Attractions*, Oxford: Butterworth-Heineman, hal.99.

“...berkembangnya nilai dan ideasional pada sebuah negara, wilayah, masyarakat ataupun peradaban dapat membuka warna baru dan nantinya dapat meninggalkan citra buruk atas sejarah atau fakta-fakta masa lalu, namun kondisi juga dapat menjadi bumerang bahwa kondisi dinilai baik dapat menjadi buruk atau justru sebaliknya, wisata budaya menunjukkan bahwa kenyataan saat ini atas pengalaman-pengalaman masa lalu.”¹¹

Pemerintah dan pariwisata merupakan dua subjek ilmu yang berbeda yang luas dan sangat kompleks. Dua subjek ilmu tersebut digunakan untuk melihat secara signifikan peran pemerintah, baik secara regulasi maupun manajemen dalam pariwisata. James Elliott menekankan pentingnya pemerintah; secara sederhana pemerintahlah yang mengupayakan stabilitas politik, keamanan, keabsahan dan kerangka finansial yang dibutuhkan dalam pariwisata.¹² Di sisi lain, pemerintah juga menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, baik berupa jalan, jalur kereta, bandara, pelabuhan maupun fasilitas umum di objek wisata.

Dengan peran pemerintah, kebijakan mengenai pariwisata dapat dibantu melalui penyediaan jasa, dapat mengontrol setiap aktivitas dan perkembangan pariwisata serta dapat menentukan standarisasi. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah lokal bertanggung jawab atas terciptanya infrastruktur dan harmonisasi dalam pembangunan. Selain itu, Elliott juga mengidentifikasi pentingnya peran pemerintah dalam pariwisata sebagai cara untuk mengembangkan

¹¹ *Ibid.*

¹² J. Elliott, *Tourism: Politics and Public Sector Management*, Routledge, London, 1997, hal. 2.

perekonomian negara.¹³ Pariwisata lebih dari sekedar industri dan aktivitas ekonomi; itu juga sangat berdampak pada fenomena sosial. Pemerintah bertanggung jawab atas aktivitas manajemen dan berperan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan manajemen khusus dari pemerintah terkait pariwisata atau *Public Sector Management* (PSM).

Di sisi lain, Joan Henderson menyebutkan bahwa berbicara mengenai pariwisata biasanya berkaitan dengan mesin dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perencanaan dan kebijakan formal mengenai pariwisata dapat dilihat dari pertimbangan pemerintah.¹⁴ Dalam konteks ini, pariwisata hadir sebagai solusi baru dalam pembangunan ekonomi kawasan. Para pemimpin negara memberikan perhatian khusus dalam sektor pariwisata melalui komitmen kerjasama pariwisata. Indonesia hadir melalui strategi pembangunan pariwisata. Strategi yang dibentuk oleh Indonesia merupakan peran besar pemerintah masing-masing daerah. Kebijakan dan rencana para pemimpin negara untuk melakukan kerjasama juga dapat dilihat dari bagaimana kondisi domestik masing-masing negara. Dalam hal ini, untuk mengintegrasikan pariwisata melalui single visa atau common visa dibutuhkan kebijakan dan langkah implementatif yang jelas dari pemerintah, termasuk dalam hal regulasi.

Berkembangnya globalisasi menjadikan peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata menjadi begitu penting. Ini disebabkan pemerintah mampu menjadi fasilitator, sekaligus pelaksana kebijakan dalam membangun kerjasama bilateral dengan negara lain. Artinya tercapainya kerjasama G to G (*government to government*) akan membuka kesempatan

¹³ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁴ J.C. Henderson, '*The Politics of Tourism: A Perspective from the Maldives*', <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/25378>, diakses pada 3 Februari 2016.

kerjasama yang lebih luas dengan melibatkan aktor swasta (*bussiness*).

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah juga dapat memanfaatkan konsep pariwisata regional dan internasional. Sebagai contoh pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan *Asean Tourism Strategic Plan* (ATSP) ataupun *Community Based Tourism* (CBT). Nantinya peran pengembangan pariwisata ini akan memberikan respon positif dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia melalui *tourism packaked* yang nantinya akan menjadikan Indonesia sebagai tujuan lanjutan setelah dari Thailand.

2. Teori Soft Diplomasi

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (Diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Ditinjau dari tujuannya, tugas diplomasi ada 4 macam:

- a. Diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya dan capak yang tersedia untuk mencapai tujuan ini.
- b. Diplomasi harus menilai tujuan-tujan negara lain dan kekuatan yang sesungguhnya dan capak yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini.
- c. Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain.
- d. Diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuannya.¹⁵ Secara

¹⁵ Hans J Morgenthau. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. hal. 617-618.

konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di masyarakat internasional.¹⁶

Diplomasi berkaitan dengan seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam arti yang luas, diplomasi dan politik luar negeri suatu negara adalah sama, namun dalam arti yang lebih sempit dan tradisional, diplomasi terkait dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut tujuan dan maksud. Dalam arti yang lebih terbatas ini, maka diplomasi mencakup teknik operasional di mana suatu negara mencari kepentingannya di luar yurisdiksinya.¹⁷

Diplomasi merupakan strategi penting dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional sebagai bagian integral dari politik luar negeri suatu negara. Secara etimologi, diplomasi berasal dari dua kata yaitu *ploma* yang berarti sehelai kertas yang dilipat dan *di* yang berarti kali, sehingga diplomasi dapat disebut sebagai suatu piagam atau surat resmi yang dibawa oleh utusan negara.

Dalam melaksanakan politik luar negeri, suatu negara menggunakan diplomasi, karena tujuan umum diplomasi adalah untuk mencapai tujuan nasional atau memajukan kepentingan nasional. Definisi diplomasi sangat beragam seperti menurut *The Oxford English Dictionary* bahwa diplomasi adalah manajemen Hubungan Internasional melalui negosiasi dimana hubungan tersebut diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil negara atau seni para diplomat. Namun secara garis besar pengertian diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹⁸

¹⁶ K.J. Holsti.1978. *International Politics, A Framework for Analysis*. New Dehl: Prentice Hall of India. hal. 82-83.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ K. M. Panikar, "The Principle and Practice of Diplomacy" dalam SL Roy, *Diplomasi*, 1991, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, hal.29.

Diplomasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Apabila ditinjau tingkat efektifitasnya maka diplomasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :¹⁹

- a. Diplomasi lunak (*soft diplomacy*)
- b. Diplomasi mengikat (*hard diplomacy*)

Soft diplomasi yang dapat dikatakan sebagai bentuk diplomasi lunak, adalah suatu cara pelaksanaan diplomasi yang mempergunakan pendekatan kebudayaan sebagai sarana bantu dalam mencapai sasaran dan tujuan, baik dalam bidang diplomasi umum maupun diplomasi khusus. Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha dengan sengaja dan terarah menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra suatu negara di luar negeri yaitu meliputi tiga hal yaitu:²⁰

- a. Menanamkan, bila citra yang baik belum ada.
- b. Mengembangkan, bila telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut.
- c. Memelihara, apabila disuatu tempat telah lahir suatu citra yang baik mengenai kenyataan dan pergeseran secara riil suatu negara.

Dalam *Oxford English Dictionary*, pengertian diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau seni para diplomat.²¹ Diplomasi sangat dibutuhkan oleh sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional suatu negara menjadi hal yang berpengaruh dalam proses diplomasi. Hampir seluruh negara didunia ini mempunyai kepentingan nasional untuk mewujudkan perdamaian didunia. Dalam kasus membangun pariwisata ini, diplomasi berperan penting dalam proses untuk mewujudkan upaya pembangunan

¹⁹ Roy Macridis, 1976, *Foreign Policy in World Politics*, Prentice Hall of India Private, Ltd, New Delhi, hal.6.

²⁰ *Ibid.*

²¹ S.L. Roy, *DIPLOMASI* (terjemahan dari Harwanto, Mirsawati), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. hal. 3.

dalam sektor pariwisata dan sebagai solusi untuk mendongkrak ekonomi negara.

Melalui uraian pendekatan/teori di atas maka dapat dipahami bahwa upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok dalam meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia tidak lepas dari tren pariwisata internasional yang mulai berubah. Di era globalisasi wisatawan dunia tidak hanya terpaku pada satu tujuan wisata di satu negara saja, namun berkembang ke beberapa negara sekaligus dengan orientasi *cheap and secure tourism*.²²

Berkembangnya tren pariwisata kemudian dipandang oleh pemerintah Indonesia dan para stekholder lainnya sebagai kesempatan yang penting untuk meningkatkan pariwisata tanah air. Untuk itu, pelibatan berbagai aktor, termasuk KBRI menjadi penting untuk memperjuangkan kemajuan pariwisata di Indonesia. keberadaan Thailand sebagai negara tujuan utama pariwisata di Asia Tenggara kemudian menjadi target penting bagi berbagai upaya KBRI Bangkok untuk mendukung kejayaan bersama dalam kerangka *mutual relationship*.

Dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia-Thailand yang dapat berjalan secara kondusif, beberapa persoalan kemudian muncul yang dapat mengganggu kemajuan citra pariwisata Indonesia, diantaranya adalah terorisme dan keselamatan transportasi untuk dapat menuju ke Indonesia, baik dengan menggunakan kapal atau pesawat. Berbagai upaya yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan menangani terorisme dan mendukung keselamatan penerbangan dapat mencapai keberhasilan, namun pencapaian ini ternyata memerlukan soft diplomasi untuk dapat

²² Cheap and secure tourism merupakan model pariwisata yang pertama kali dimuat oleh rubrik Travel Magazine Edisi Juni 2010 yang menekankan bahwa para wisatawan semakin mengarah dan meminati pariwisata murah dan aman untuk dapat mengunjungi beberapa obyek atau wilayah sekaligus. Sumber: Travel Magazine, Edisi Maret 2010, hal.34.

meningkatkan daya tarik Indonesia di mata internasional, khususnya berkaitan dengan meningkatkan kunjungan wisata.

Kemudian dari paparan pendekatan di atas maka dapat dielaborasi dan diaplikasikan bahwa upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok dalam meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia merupakan bagian dari konstelasi pariwisata internasional yang mulai berubah. Ini berkaitan dengan *inbound* dan *outbound tourism* yang semakin berminat untuk mengadakan perjalanan wisata ke beberapa negara sekaligus, sehingga ini akan banyak membuka potensi kerjasama diantara negara-negara yang terletak di wilayah yang sama untuk mengembangkan kerjasama bidang pariwisata.

Kemudian jika dikaitkan dengan konsep peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata maka kemajuan pariwisata di suatu negara sangat ditentukan oleh kontribusi berbagai aktor diantaranya masyarakat, pelaku usaha (perhotelan, restoran, jasa transportasi dan lain-lainnya), serta pemerintah. Hanya saja dinamika kerjasama bidang pariwisata pada kelompok negara dunia ketiga memerlukan kontribusi pemerintah untuk dapat membuka pintu awal kerjasama dengan negara lain untuk menjadi fasilitator dalam menyelaraskan tatanan pariwisata dunia terbaru.

Beberapa konsep baru dalam tatanan pariwisata internasional diantaranya adalah *Community Based Tourism* (CBT), *sister city* dan *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP). Kerjasama ini menjadi fokus antara Indonesia dan Thailand dalam mengembangkan pariwisata bersama, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Skema lainnya dalam kerjasama kedua negara melalui KBRI adalah melalui pengembangan konsep pariwisata moderen.

Kemudian Jika dikaitkan dengan teori diplomasi maka upaya KBRI selanjutnya adalah upaya memperluas skema kerjasama dengan melibatkan aktor-aktor lebih luas, termasuk aktor swasta (*bussiness*), pemerintah dan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui diplomasi lunak dengan harapan publik internasional yang berkunjung ke Thailand, serta masyarakat Thailand untuk dapat berkunjung ke Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh hipotesis yakni upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok-Thailand dalam meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia diwujudkan melalui beberapa kebijakan, yaitu:

- a. Mendukung kerjasama antara Indonesia dan Thailand dalam penyelarasan dan integrasi pariwisata Indonesia dengan tatanan pariwisata dunia, serta mengembangkan konsep pariwisata moderen.
- b. Menerapkan konsep diplomasi lunak (*soft diplomacy*) dengan berbagai pembangku kepentingan pariwisata Thailand dalam lingkup *Government to Government* dan *Government to Bussines* Menjalankan diplomasi lunak (*soft diplomacy*) dengan berbagai pembangku kepentingan pariwisata Thailand dalam lingkup *Government to Government* dan *Government to Bussines*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.²³ Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1989, hal.140-141.

kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.²⁴

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam metode penelitiannya yaitu dengan berdasarkan kerangka pemikiran, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empirik yang ada. Metode penelitian yang digunakan penulis lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan menggunakan situs-situs internet yang terkait dengan upaya diplomasi yang dilakukan KBRI Bangkok dalam membangun/meningkatkan wisatawan asal Thailand berkunjung ke Indonesia.

F. Jangkauan dan Fokus Penelitian

1. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini mengambil pada periode 2006 hingga 2016. Dipilih tahun 2006 karena menjadi periode yang menunjukkan dinamika penurunan pariwisata di Thailand, sekaligus stagnasi (perkembangan yang tidak optimal) dari pariwisata Indonesia. Sedangkan tahun 2016 dipilih sebagai periode yang menunjukkan kemajuan/progresifitas dari pariwisata Indonesia yang berkaitan dengan dengan eksistensi pariwisata Thailand yang menjadi bukti atas keberhasilan implementasi upaya-upaya yang dijalankan KBRI di Thailand.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, menjelaskan mengenai bagaimana upaya Indonesia menjalin hubungan dengan Thailand dalam rangka membangun/meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand untuk berkunjung ke Indonesia. Penulis kemungkinan akan sedikit menyinggung

²⁴ *Ibid.*

masalah diluar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini bertujuan untuk mengobservasi atau meneliti permasalahan yang terjadi, serta membuktikan hipotesa tentang upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok dalam meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia.
- b. Menerapkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional pada isu-isu kontemporer sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sebelumnya serta aspek-aspek yang belum termasuk di dalam penulisan ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu politik dengan spesialisasi program studi hubungan internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah upaya penulisan, maka sistematika penulisan dalam hal ini terbagi menjadi lima bab, antara lain:

- BAB I. Menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II. Menjelaskan tentang profil Thailand, serta sejarah dan dinamika hubungan Indonesia dengan Thailand.
- BAB III. Menjelaskan tentang kondisi dan potensi wisata di Indonesia, meliputi berbagai persoalan yang dihadapi.
- BAB IV. Dalam bab ini penulis akan memaparkan upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Thailand di Bangkok dalam meningkatkan jumlah wisatawan asal Thailand ke Indonesia.
- BAB V. Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan bab-bab yang sebelumnya dibahas.

